

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan sebelumnya digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitiannya adalah sebagai berikut:

Menurut Ningsaptiti (2010), hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba adalah konsentrasi kepemilikan saham, ukuran perusahaan dan kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri auditor. Selanjutnya, variabel independen komposisi dewan komisaris dan komposisi komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Menurut Praditia (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Menurut Suryani (2010), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Variabel ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Menurut Panggabean (2011), hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa komite audit independen dan kualitas auditor eksternal berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba, sedangkan proporsi dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hasil analisis juga menemukan variabel kontrol *leverage* mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *earning management* sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Menurut Sefiana (2012), hasil dari penelitian ini bahwa variabel independen terbukti tidak berpengaruh untuk mengurangi tindakan manajemen laba. Hal ini dikarenakan penerapan *corporate governance* masih terbilang baru di Indonesia jadi tujuannya belum secara efektif dapat dirasakan. Selain itu, penerapan GCG sudah mulai banyak diterapkan dalam dunia usaha namun pelaksanaannya masih belum dapat terpenuhi secara baik.

Menurut Bayu Aji (2012), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*. Sedangkan dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *earnings management* .

Menurut Aji (2012), hasil penelitian ini secara simultan berhasil membuktikan bahwa faktor ukuran komite audit, komite audit independen dan pertemuan komite audit memberikan pengaruh terhadap manajemen laba namun tidak signifikan terhadap kualitas laba.

Menurut Effendi (2013), dari hasil penelitiannya ukuran perusahaan, komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Tetapi aktivitas komite audit dan kepemilikan saham institusional justru tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Sedangkan menurut Abdillah (2014), yang dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 dari hasil penelitian analisis regresi data panel menunjukkan bahwa kualitas auditor, komite audit dan *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian dari hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh signifikan, sedangkan komite audit dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2006-2008)</p>	<p>Ningsaptiti (2010)</p>	<p>konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, <i>corporate governance</i>, manajemen laba</p>	<p>1. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya total penjualan yang dimiliki perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan berdampak terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan besar cenderung lebih kecil melakukan tindakan manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil.</p> <p>2. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan semakin kecil kemungkinan adanya praktek manajemen laba.</p> <p>Hal ini disebabkan karena konsentrasi kepemilikan dapat membuat pemegang saham pada posisi yang kuat untuk mengendalikan manajemen secara efektif sehingga mampu membatasi perilaku oportunitis.</p>

(Lanjutan) Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			3. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya komposisi dewan komisaris tidak berdampak pada manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya dewan komisaris independen tidak menjamin kebijakan manajemen laba yang diterapkan di perusahaan.
Aalisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2005-2008	Praditia (2010)	kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, kualitas auditor, manajemen laba dan nilai perusahaan	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi tidak mampu mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba. 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mampu menjadi mekanisme <i>corporate governance</i> yang dapat mengurangi ketidaksielarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham sehingga dapat menimbulkan terjadinya tindakan manajemen laba.

(Lanjutan) Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak mampu mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tindakan manajemen laba.</p> <p>4. Kualitas auditor tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan auditor yang berkualitas tidak menjamin dapat mencegah terjadinya tindakan manajemen laba.</p> <p>5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusi tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan.</p> <p>6. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial bukan merupakan cara untuk meningkatkan nilai perusahaan.</p> <p>7. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, artinya dapat mengurangi nilai perusahaan.</p>

(Lanjutan) Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI	Suryani (2010)	Manajemen laba, mekanisme <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. 2. Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 3. Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 4. Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 5. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 6. Variabel Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan kecil cenderung

(Lanjutan) Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			7. melakukan praktik manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan besar.
Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan <i>GO PUBLIC</i> DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)	Panggabean (2011)	Dewan komisaris, komite audit, auditor eksternal, kosentrasi kepemilikan, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan <i>discretionary accrual</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa komite audit independen dan kualitas auditor eksternal berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris dan kosentrasi kepemilikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hasil analisis juga menemukan variabel kontrol <i>leverage</i> mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap <i>earning management</i> Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.
Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Telah <i>Go Public</i> Di BEI	Sefiana (2012)	perbankan, <i>corporate governance</i> , manajemen laba	Dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda, hasil dari penelitian ini bahwa variabel independen terbukti tidak berpengaruh untuk mengurangi tindakan manajemen laba. Hal ini dikarenakan penerapan <i>corporate governance</i> masih terbilang baru di Indonesia jadi tujuannya belum secara efektif

(Lanjutan) Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			dapat dirasakan. Selain itu, penerapan GCG sudah mulai banyak diterapkan dalam dunia usaha namun pelaksanaannya masih belum dapat terpenuhi secara baik.
Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia	Bayu Aji (2012)	<i>corporate governance, earnings management</i> , ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, reputasi auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>earnings management</i>. 2. Sedangkan dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>earnings management</i>. 3. Pengukuran ukuran dewan direksi dengan menjumlah seluruh dewan direksi yang ada pada perusahaan sampel, pengukuran dewan komisaris independen dengan menggunakan proporsi dari jumlah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibagi dengan total dewan komisaris, pengukuran reputasi auditor dengan menggunakan variabel <i>dummy</i> jika termasuk dalam KAP (Kantor Akuntan Publik) <i>Big 4</i> maka diberi kode 1 jika tidak termasuk dalam KAP <i>Big 4</i> diberi kode 0, pengukuran komite audit

(Lanjutan) Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			dengan cara menjumlah seluruh anggota komite audit pada perusahaan sampel, dan pengukuran variabel ukuran perusahaan dengan menggunakan <i>log natural</i> dari <i>total asset</i>
Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kualitas Laba Dan Manajemen Laba Di Bursa Efek Indonesia	Aji (2012)	komite audit, kualitas laba, manajemen laba.	Hasil penelitian ini secara simultan berhasil membuktikan bahwa faktor ukuran komite audit, komite audit independen dan pertemuan komite audit memberikan pengaruh terhadap manajemen laba namun tidak signifikan terhadap kualitas laba.
Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba	Effendi (2013)	Komposisi dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, manajemen laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil penelitiannya ukuran perusahaan, komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 2. Sedangkan ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Tetapi aktivitas komite audit dan kepemilikan saham institusional justru tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

(Lanjutan) Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Peneliti	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012)	Abdillah (2014)	Kualitas audit, komite audit, <i>corporate governance</i> , manajemen laba	Dari hasil penelitian analisis regresi data panel menunjukkan bahwa kualitas auditor, komite audit dan <i>corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian dari hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan bahwa kualitas auditor berpengaruh signifikan, sedangkan komite audit dan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemn laba.

Dari rangkuman penelitian diatas, penulis akan melakukan penelitian yang mendalam tentang pengaruh kualitas audit dan *corporate governance* terhadap manajemen laba dengan merujuk pada penelitian (Effendi, 2013) dan (Abdillah, 2014) dengan menggunakan proksi tambahan berupa dewan komisaris independen pada variabel *corporate governance* dan objek yang berbeda dengan variabel penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan objek perusahaan LQ-45.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Agensi

Konsep *agency theory* menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ningsaptiti (2010) adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan manajemen sebagai agen mereka. Pemegang saham memberikan mandat pada manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Jadi pada dasarnya hubungan keagenan terjadi karena adanya kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) dan manajemen (agen).

Menurut Arifin (2005) teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal berperan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada agen, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Sehingga terciptalah kontrak kerja yang baik, kontrak kerja yang baik adalah kontrak kerja yang dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan manajer dalam mengelola dana investasi dan mekanisme bagi hasil berupa keuntungan, return dan risiko-risiko yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Konflik antara prinsipal dan agen dapat terjadi karena termotivasi oleh kepentingan masing-masing sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan

dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya.

Menurut Eisenhard (1989) dalam Arifin (2005) teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu:

1. Asumsi tentang sifat manusia.

Menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

2. Asumsi tentang keorganisasian.

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

3. Asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. *Principal* karena dia memiliki modal maka mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan *agen* yang bertugas menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Akibat dari akses informasi *agen* yang lebih banyak dan menyeluruh, tidak menutup kemungkinan agen dapat melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang karena agen memiliki motivasi untuk memaksimalkan kebutuhan

ekonomi dan psikologisnya. Bahkan agen juga dapat menggunakan akuntansi sebagai alat untuk perekayasa demi memenuhi kepentingannya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Watts dan Zimmerman (1986) dalam Praditia (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, prinsipal dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen. *Principal* karena dia hanya memiliki modal dan tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Sedangkan *agen* yang bertugas menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan informasi yang disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*). Akibat dari asimetri informasi menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) dalam Arifin (2005) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Praditia (2010) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan pemegang saham. Penelitian ini menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan dengan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Hal ini membuktikan bahwasanya dengan lebih banyaknya pihak manajemen terlibat dalam penanaman saham maka akan memperkecil resiko terjadinya manipulasi laba.

2.2.2 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Manajemen membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2012):

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka

Laporan keuangan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang disajikan terdiri dari :

1) Neraca

Neraca menyediakan informasi posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan. Dan memberikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas pemilik. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

2) Laporan Laba Rugi

Dari laporan laba rugi investor dan kreditor dapat mengetahui pendapatan dan beban-beban suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi juga merupakan tujuan utama untuk mengukur tingkat keuntungan atau keberhasilan operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Investor dan kreditor menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan, dan membantu menilai resiko ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan.

3) Laporan arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama satu periode,

transaksi investasi, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode.

4) Laporan Perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas pemegang saham melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama tahun berjalan.

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan mengenai rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta laporan tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga menjelaskan tentang metode yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, informasi terkait laporan keuangan dan kebijakan yang digunakan perusahaan.

Dalam laporan keuangan tersebut terdapat elemen–elemen yang menyusun laporan keangan. SFAC No.6 “ *Elements of Financial Statements of Bussiness Entererprises* “ menjelaskan bahwa ada 10 element laporan keuangan, yaitu:

a) Aktiva (*Assets*)

Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu.

b) Hutang (*Liabilities*)

Hutang adalah probabilitas pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang ditimbulkan dari kewajiban entitas tertentu saat ini untuk memindahkan asset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai hasil transaksi atau kejadian masa.

c) Ekuitas (*Equity*)

Ekuitas adalah hak sisa (residual interest) atas aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan hutang

d) Investasi oleh pemilik (*Investment by Owners*)

Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas (aktiva neto) entitas bisnis sebagai hasil dari transfer sesuatu yang berharga ke entitas tertentu (perusahaan) dari entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan ekuitas pemilik di perusahaan tersebut. Pemilik pada umumnya menerima asset sebagai investasi, tapi dapat juga berupa jasa atau kepuasan atau konversi liabilitas (kewajiban) perusahaan.

e) Distribusi pada pemilik (*Distribusi to Owners*)

Distribusi pada pemilik adalah penurunan ekuitas (aktiva neto) entitas (perusahaan) yang dihasilkan dari perpindahan asset, penyewaan jasa, atau pemberian pinjaman dari perusahaan kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik akan mengurangi ekuitas pemilik di perusahaan tersebut.

f) Laba Komprehensif (*Comprehensive Income*)

Labanya komprehensif adalah perubahan ekuitas (aktiva neto) suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya dari sumber yang bukan berasal dari pemilik. Meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas selama satu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik.

g) Pendapatan (*Revenue*)

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas (atau kombinasi keduanya) selama satu periode, yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus menerus.

h) Biaya (*Expenses*)

Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva suatu entitas, yang terkait dengan liabilitas (atau kombinasi keduanya) dari mengantarkan, menyewakan jasa, atau melakukan aktivitas lain yang menjadi aktivitas operasi utama perusahaan.

i) Keuntungan (*Gains*)

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva neto) dari transaksi insidental suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam suatu periode di luar transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik.

j) Kerugian (*Losses*)

Kerugian adalah penurunan ekuitas (aktiva neto) dari transaksi insidental suatu entitas dari seluruh transaksi lain dan kejadian lain dan keadaan yang mempengaruhi entitas kecuali yang berasal dari revenue atau investasi dari pemilik.

Laporan keuangan harus disusun dengan baik agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai laporan keuangan. Hal yang harus diperhatikan adalah karakteristik kualitatif dari informasi. Chariri dan Ghozali (2007:409) dalam bukunya "*Teori Akuntansi*" menyatakan bahwa karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi tersebut antara lain :

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi tindakan yang diambil.

2. Keandalan (*reliability*)

Keandalan merupakan informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang

dihasilkan. Dalam konteks kerangka konseptual, agar memiliki keandalan, informasi harus di uji kebenarannya (*reliabel*), netral, dan menggambarkan keadaan secara wajar sesuai peristiwa yang digambarkan (*representational faithfulness*).

3. Daya banding dan konsistensi

Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Disamping itu, informasi dikatakan bermnfaat kalau ada konsistensi dalam proses penyajiannya.

4. Pertimbangan *cost-benefit*

Pertimbangan *cost-benefit* dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan.

5. Materialitas

Materialitas merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi. Pertimbangan utama dari konsep ini adalah apakah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil.

Perusahaan menyediakan informasi keuangan dalam suatu pelaporan keuangan dengan tujuan untuk membantu pemakainya membuat keputusan-keputusan alokasi modal. IAI mengidentifikasi para pemakai laporan keuangan berdasarkan kepentingan mereka. Para pemakai laporan keuangan meliputi:

a. Investor

Berkepentingan dengan resiko dan hasil investasi yang mereka lakukan. Informasi dibutuhkan untuk menentukan apakah mereka akan membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Yang biasa dilihat oleh investor adalah informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

b. Kreditor

Menggunakan informasi akuntansi untuk membantu mereka memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada waktu jatuh tempo.

c. Pemasok

Mebutuhkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo.

d. Karyawan

Mebutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, dan kemampuan member pensiun dan kesempatan kerja.

e. Pelanggan

Berkepentingan dengan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan terutama bagi mereka yang memiliki perjanjian jangka panjang dengan perusahaan.

f. Pemerintah

Berkepentingan dengan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan menyusun statistik pendapatan nasional, dan lain-lain.

g. Masyarakat

Berkepentingan dengan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta berbagai aktivitas yang menyertainya.

2.2.3 *Corporate Governance*

2.2.3.1 *Pengertian dan Tujuan Corporate Governance*

Isgiyarta dan Triatiarini (2005) dalam Praditia (2010) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Jadi sistem itulah yang nantinya menjadi dasar bagi pemegang saham dan manajemen untuk melakukan pengendalian dalam perusahaannya.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka :

- Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Menurut Siswantaya (2007) dalam Praditia (2010), sasaran utama *corporate governance* adalah:

- Secara internal yaitu adanya sistem dan struktur yang menjamin berjalannya fungsi dari organ-organ perusahaan (RUPS, komisaris dan

direksi) secara seimbang. Hal ini berkaitan dengan masalah tersebut antara lain adanya pemenuhan hak-hak pemegang saham secara adil, pengendalian yang efektif oleh dewan komisaris, serta pengelolaan perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab oleh direksi.

- Secara eksternal menyangkut pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Hal ini terkait dengan bagaimana perusahaan mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tersebut termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan untuk taat kepada peraturan yang ada.

Jadi pada dasarnya *corporate governance* sendiri merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang dapat berfungsi sebagai media atau alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Apabila investor berkurang kepercayaannya karena adanya tindakan manajemen laba yang kurang baik, maka mereka melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Sehingga perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu di dalam suatu perusahaan diperlukan control yang baik dengan cara mengelolanya dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*.

Adapun beberapa indikator yang mengarah pada mekanisme *corporate governance* antara lain:

- 1) kepemilikan manajerial,
- 2) kepemilikan institusional,

- 3) proporsi dewan komisaris independen,
- 4) ukuran dewan komisaris.

Faisal (2004) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengidentifikasi menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen, berbeda dengan kepemilikan institusional berperan sebagai pihak yang memonitor perusahaan.

Adapun variabel yang digunakan sebagai proksi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kepemilikan Manajerial

Masalah keagenan sering muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Menurut Ningsaptiti (2010), Suryani (2010) dan Effendi (2013), yang menemukan bukti bahwa konsentrasi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, semakin besar kepemilikan saham maka semakin kecil praktik manajemen laba. Ini disebabkan karena kepemilikan saham yang terkonsentrasi dapat membuat pemegang saham pada posisi yang kuat untuk mengendalikan manajemen secara efektif sehingga mampu membatasi perilaku oportunistik oleh manajer.

b) Kepemilikan Institusional

Adanya kepemilikan institusi dari pihak manajerial dianggap bisa mengurangi kecenderungan manajer dalam memanipulasi laba. Menurut Ningsaptiti (2010) dan Suryani (2010), yang menemukan bukti bahwa konsentrasi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Artinya, dengan adanya kepemilikan institusi memperkecil resiko terjadinya manipulasi laba di dalam perusahaan. Apa lagi jika di dukung dengan kepemilikan yang sama kuat antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

c) Dewan Komisaris independen

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dan pemegang saham, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Menurut Bayu Aji (2012) dan Effendi (2013), jika penempatan dewan komisaris independen masih ada campur tangan para pemegang saham mayoritas (pengendali/*founder*) artinya masih memegang peranan penting menyebabkan kinerja dewan tidak meningkat bahkan menurun. Kondisi ini juga ditegaskan dari survei *Asian Development Bank* dalam Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya pengendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen, sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif. Padahal masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Tugas Komisaris independen yaitu memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, tugas – tugas tersebut antara lain (Beasley,1996) dalam (Nasution dan Setyawan,2007):

- Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan
- Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
- Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

2.2.3.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Untuk merealisasikan sasaran dalam pelaksanaan *corporate governance* tersebut digunakan empat prinsip utama (Isgiyarta dan Tristiarini, 2005) dalam (Praditia,2010) yaitu :

a. Transparansi (*Tranparency*)

Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama.

Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan. Praktek yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang terkait dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada seluruh pihak struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.

b. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan (*fraud*) dan praktek-praktek *insider trading*.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak

kewajibannya. Praktek-praktek yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengangkatan komisaris independent merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

d. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Responsibilitas juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sangsi, baik sangsi hukum maupun sangsi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

2.2.3.3 Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat *corporate governance* menurut Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

- Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan corporate value.
- Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan *OECD Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membantu para negara anggotanya maupun negara lain berkenaan dengan upaya-upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan *regulatori corporate governance* dan memberikan pedoman dan saran-saran untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pengembangan good corporate governance (Darmawati, 2003) dalam(Suryani,2010).

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Hak-hak para pemegang saham.

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham yaitu hak untuk

- (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan

- (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya
 - (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
 - (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
 - (5) memilih anggota dewan komisaris
 - (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.

Kerangka kerja *corporate governance* harus menjamin adanya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak-hak mereka.

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan.

Kerangka kerja *corporate governance* harus mengakui hak-hak stakeholders seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan stakeholders dalam penciptaan kesejahteraan, pekerjaan-pekerjaan, dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan yang sehat secara finansial.

4. Transparansi dan Keterbukaan.

Kerangka kerja *corporate governance* harus menyakinkan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal-hal yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi

keuangan, kinerja, kepemilikan, dan ketaatan perusahaan (*governance of company*).

5. Peranan Dewan Komisaris.

Kerangka kerja *corporate governance* harus menyakinkan pedoman strategik perusahaan, pemantauan yang efektif pada manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

2.2.4 Kualitas Audit

Selain *corporate governance*, mekanisme yang bisa digunakan untuk mengurangi *earning management* yang dilakukan manajemen adalah auditor independen dan kualitas audit. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran KAP. Menurut Panggabean (2011), Effendi (2013), dan Abdillah (2014) bahwa semakin ahli KAP terhadap industri tertentu maka semakin baik audit yang dilakukan sehingga manajemen laba dapat lebih cepat terdeteksi. Hal ini disebabkan KAP yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama, akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus yang mewakili industri tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas auditor eksternal menurut (Koroy, 2008 dalam Panggabean,2011) adalah :

1. Karakteristik terjadinya kecurangan

Ketidakmampuan auditor dalam pendektasian kecurangan ini ada hubungan dengan keahliannya dibentuk oleh pengalaman yang relevan dengan kecurangan. Kecurangan itu sendiri frekuensi terjadinya jarang dan tidak semua auditor pernah mengalami kasus terjadinya kecurangan, sehingga pengalaman auditor berkaitan dengan kecurangan tidak banyak. Pengalaman saja tidak cukup dalam mendeteksi kecurangan kecuali jika pengalaman itu diperoleh dari industri yang sama atau melalui penugasan yang melibatkan kekeliruan atau kecurangan yang material.

2. Standar pengauditan

Dalam pendektasian kecurangan yang menjadi masalah bukanlah ketiadaan standar pengauditan yang memberikan pedoman bagi upaya pendektasian kecurangan, tetapi kurang memadainya standar tersebut memberikan arah yang tepat. Hal ini terlihat dari uraian perkembangan standar pengauditan di depan yang menunjukkan usaha untuk terus menerus memperbaiki standar yang mengatur pendektasian kecurangan. Perbaikan ini terutama timbul dari kenyataan bahwa tanggung jawab pendektasian kecurangan pada praktek belum cukup efektif dilaksanakan.

3. Lingkungan kerja audit

Tekanan-tekanan dalam lingkungan pekerjaan KAP (Kantor Akuntan Publik) kemungkinan berdampak buruk bagi kualitas audit. Tekanan-tekanan lingkungan pekerjaan itu dapat dibagi menjadi atas beberapa hal yaitu :

- Tekanan kompetisi atas fee,

Kompetensi yang semakin tajam di antara kantor akuntan publik untuk memperebut klien memang tidak terhindarkan lagi dalam bisnis jasa akuntansi. Namun hal ini mempunyai implikasi yang perlu menjadi perhatian oleh pihak profesi akuntan publik yaitu kompetisi yang semakin tajam akan mengakibatkan penekanan untuk penurunan fee audit, sehingga KAP mengurangi pekerjaan audit untuk mempertahankan margin labanya dan mengarah pada perubahan baik atas kejadian kecurangan maupun pendektasian kecurangan.

- Tekanan waktu,

Tekanan waktu adalah ciri lingkungan yang biasa dihadapi auditor. Adanya tenggang waktu penyelesaian audit membuat auditor mempunyai masa sibuk yang menuntut agar dapat bekerja cepat. Para peneliti dan praktisi banyak berpendapat bahwa tekanan ini dapat memperburuk kualitas pekerjaan audit.

- Relasi hubungan auditor-auditee.

Kedekatan hubungan ini mempunyai implikasi atas independensi dan obyektivitas auditor. Kedekatan ini juga memperkuat kepercayaan dan komunikasi sehingga komunikasi sensitif akan diperlakukan bijaksana dan tindakan tepat dapat dilakukan dengan cara diplomatis namun efektif.

- Metode dan prosedur audit

Komisi Cohen (1978) telah menyebutkan bahwa metode dan prosedur audit yang tradisional tidaklah selalu dapat memberikan keyakinan yang

seharusnya diberikan dalam upaya pendektesian kecurangan. Komisi ini menyarankan agar auditor menaruh perhatian atas efektifitas teknik pengauditan konvensional dan perlunya pengembangan teknik baru.

Auditor eksternal memiliki hubungan kerja dengan komite audit dalam mengadakan pengawasan eksternal audit yang berkualitas, dimana komite audit harus melakukan beberapa hal (KNGCG 2002) yaitu :

1. Memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan/atau penggantian auditor eksternal
2. Meninjau surat pengangkatan auditor eksternal
3. Meninjau biaya untuk eksternal audit
4. Meninjau lingkup dan perencanaan audit eksternal
5. Meninjau laporan audit eksternal
6. Meninjau management letters audit eksternal
7. Memonitor kinerja auditor eksternal
8. Memastikan, bahwa auditor eksternal bekerja sesuai dengan standar profesional yang bersangkutan, khususnya dalam hubungan dengan independensi

2.2.5 Manajemen Laba

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2004). Definisi manajemen laba juga dikemukakan oleh Schipper dalam Belkaoui (2004) yang melihat manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Scott (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer mempunyai perilaku *opportunistic* dalam mengelola perusahaan. Manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif-alternatif yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Scott (2006) membagi pola manajemen laba menjadi 4:

1. *Taking a bath*

Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

2. *Income minimization*

Pola ini mirip dengan pola *taking a bath* namun lebih sedikit ekstrim. Pola ini biasanya dilakukan saat perusahaan mendapatkan profitabilitas yang tinggi sehingga jika profitabilitas pada periode yang akan datang diperkirakan

akan mengalami penurunan yang cukup drastis, maka perusahaan dapat menggunakan laba sebelumnya untuk mengatasi hal tersebut.

3. *Income maximization*

Manajer perusahaan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan mendapatkan bonus. *Income maximization* dilakukan saat perusahaan mengalami penurunan laba.

4. *Income smoothing*

Income smoothing merupakan salah satu pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara meratakan perolehan laba perusahaan sehingga laba yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi.

Motivasi yang melatarbelakangi terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer, antara lain:

1. *Bonus Purposes*

Manajer yang lebih mengetahui informasi tentang laba perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham cenderung bersifat *opportunistic* dan melakukan tindakan manajemen laba untuk memaksimalkan laba saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan insentif berupa bonus.

2. *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. *Taxation Motivations*

Taxation Motivation dilakukan perusahaan dengan tujuan penghematan pajak. Manajemen laba dilakukan untuk memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya.

4. Pergantian *CEO*

Manajemen laba yang dilakukan oleh CEO yang telah mendekati masa pensiunnya biasanya dilakukan dengan menaikkan laba dengan tujuan mendapatkan bonus.

5. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang baru pertama kali melakukan penawaran sahamnya dan belum memiliki nilai pasar memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan di masa yang akan datang.

6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan harus disampaikan oleh manajer kepada investor sebagai bentuk tanggungjawab manajer. Oleh karena itu, pelaporan laba perlu dibuat sedemikian rupa sehingga investor tetap menilai bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sesuai keinginan.

2.3 Kajian Perspektif Islam

- *Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.

Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38 :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ

مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ

هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat.

2. Taqwa dan Ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS at-Taubah: 109.

بُنْيَانُهُ أَمْسَسَ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ بُنْيَانِهِ أَمْسَسَ أَمْ مَنْ خَيْرٌ اللَّهُ وَرِضْوَانٍ عَلَىٰ
شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

3. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا ﴿٨﴾
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“ Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Dalam konteks keadilan (sosial) , para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

4. Kemashlahatan

Secara umum , mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufسادah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni (Nuruddin, 2012:58) :

- ✓ Pemeliharaan agama (*hifdzud-din*)

- ✓ Pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*)
- ✓ Pemeliharaan akal (*hifhzul- 'aql*)
- ✓ Pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*)
- ✓ Pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*)

- **Audit**

Di dalam al-quran auditing sudah dijelaskan mengenai hukum-hukumnya dan bagaimanakah kita berperan sebagai auditor harus bersikap. Menurut Al-Qur'an auditing salah satunya dijelaskan dalam surat Asy-Syua'ra, 26: 181-184 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
 ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ شَيْئاً هُمَا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
 ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ ﴿١٨٤﴾ الْأُولِينَ

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan yang sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi

yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu Auditing.

- Laba

Islam sangat memperhatikan aspek - aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan . Sebagai contoh , riset -riset dalam akuntansi islam menerangkan bahwa syariat islam sudah mencakup kaidah - kaidah dan hukum - hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi - transaksi sosial) atau perdagangan. Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter.

Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Pengertian laba (Khath) secara bahasa atau menurut Al -Qur' an, As - Sunnah, dan pendapat ulama - ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah

pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Dalam mendirikan suatu perusahaan, pasti tidak lepas dari tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan didirikan dengan memiliki berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh pemiliknya. Bagaimana progress ke depan, akan menjadi seperti apa perusahaannya, dan bahkan sampai seberapa besar perusahaan menghasilkan laba. Tetapi jika laba tersebut disalahgunakan justru kita akan mendapat dosa dan kemudharatan.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam, adapun laba atau keuntungan sendiri salah satunya dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu:

1) QS.Al-Baqarah (2:16)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

﴿١٦﴾

“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Ada beberapa penafsiran dari ayat ini, seperti dalam tafsir Al-Qurthubi al-Jamii li Ahkamil-Quran, yaitu pada fiman Allah. Allah mendasarkan pengertian laba dagang itu kepada kebiasaan orang Arab seperti pada ucapan mereka, dalam al-hadist “beruntung denganmu”, dan “merugi transaksimu”. Kedua ungkapan ini berarti “kamu beruntung dan merugi dalam jual beli kamu”. Adapun dalam tafsiran-Nasafi dikatakan bahwa laba itu ialah kelebihan dari pokok dan perdagangan itu ialah pekerjaan si pedagang. Si pedagang ialah orang yang membeli dan

menjual untuk mencari laba. Dengan adanya kalimat ”membeli kesesatan dengan kebenaran (petunjuk)” , kemudian langsung diikuti dengan menyebutkan laba dan dagang serta mereka tidak mendapat petunjuk dalam perdagangan mereka, seperti para pedagang yang selalu merasakan keuntungan dan kerugian dalam dagangannya. Jelasnya, tujuan para pedagang ialah menyelamatkan modal pokok dan meraih laba. Sementara itu, orang-orang yang dicontohkan dalam ayat-ayat di atas menyia-nyiakan semua itu, yaitu modal utama mereka ialah al-huda (petunjuk), tetapi petunjuk itu tidak tersisa pada mereka karena adanya dhalah (penyelewengan) atau (kesesatan) dan tujuan-tujuan duniawi. Jadi, yang dimaksud dengan dhal ialah orang-orang yang merugi karena orang tersebut tidak dapat menyelamatkan modal utamanya, maka orang seperti ini tidak bisa dikatakan orang yang beruntung.

2) QS. At-Taubat (9:111)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
لِلَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

﴿ ۱۱۱ ﴾

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, maka gembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar”

Ayat tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Dengan demikian, prinsip dasar yang ditekankan Al-Qur'an adalah kerja dan kerja keras. Pandangan Islam mengenai visi tentang etika bisnis harus berlandaskan pada tiga tema kunci utama yang juga merupakan pedoman bagi semua kegiatan umat Islam. Ketiga tema kunci utama itu adalah Iman, Islam, dan Taqwa.

Adapun didalam al hadist jelaskan bahwa ada dua prinsip di dalam perniagaan, yaitu :

- a) Prinsip suka sama suka

Islam yang anda cintai ini menghormati hak kepemilikan umatnya. Karenanya, Islam mengharamkan kita untuk mengambil hak saudara kita tanpa kerelaannya - walau sekedar bercanda .

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا وَلَا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصًا أَخِيهِ

فَلْيُرُدِّدْهَا عَلَيْهِ

Janganlah sekali-kali engkau bercanda dengan mengambil harta saudaramu, dan tidak pula bersungguh-sungguh mengambilnya. Dan bila engkau terlanjur mengambil tongkat saudaramu, hendaknya engkau segera mengembalikannya.

[HR Ahmad, 4/221]

Tidak heran bila Islam menggariskan agar setiap perniagaan dilandasi dengan asas suka sama suka. Allâh Azza wa Jalla berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا مَوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. [QS.An-Nisa'/4:29]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwanya. [HR Ahmad, dan dishahihkah oleh al-Albani rahimahullah dalam Shahîh at-Targhîb wat Tarhîb no:839]

Dan pada hadits lain beliau slebih tegas lagi bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka. [HR. Ibnu Mâjah dan dinyatakan shahih oleh al-Albani].

Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Janganlah dua orang yang berjual-beli berpisah ketika mengadakan perniagaan kecuali atas dasar suka-sama suka. [HR. Ahmad dan dinyatakan shahih oleh al-Albani rahimahullah].

Betapa kacau kehidupan manusia bila mereka bebas membeli harta sesama, tanpa memperdulikan kerelaan pemiliknya. Pertikaian, tindak anarkis, permusuhan bahkan pertumpahan darah tidak mungkin terelakkan. Berdasarkan ini, para Ulama' menyatakan, bahwa tidak sah perniagaan orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan.

b) Tidak Merugikan Orang Lain.

Umat Islam adalah umat yang bersatu-padu, sehingga mereka merasa bahwa penderitaan sesama muslim adalah bagian dari penderitaannya. Allah berfirman, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara." [Al-Hujurat/49:10]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam banyak haditsnya juga menegaskan hal ini. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا

اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ

Perumpamaan umat Islam dalam hal kecintaan, kasih sayang, dan bahu-membahu sesama mereka seperti satu tubuh. Bila ada anggota tubuh yang menderita,

niscaya anggota tubuh lainnya turut merasakan susah tidur dan demam. [HR. Muslim, no. 2586]

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Hadits ini dengan tegas dan jelas menunjukkan betapa agung hak-hak sesama umat Islam. Hadits ini juga merupakan anjuran kepada mereka agar saling menyayangi, berlemah-lembut dan membantu dalam hal-hal yang tidak termasuk perbuatan dosa atau hal-hal yang dibenci."

Dalam hadits lain, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

حَيْرُهُ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا
عِبَادَ اللَّهِ لَا تَحَاسَدُوا إِخْوَانًا الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا خُدْلُهُ

Janganlah engkau saling hasad, saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya), saling membenci, saling merencanakan kejelekan, saling melangkahi pembelian sebagian lainnya. Jadilah hamba-hamba Allâh yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidaklah ia menzhalimi saudaranyanya, tidak pula ia membiarkannya dianiaya orang lain dan tidak layak baginya untuk menghina saudaranya. [HR. Bukhâri, no. 5717 dan Muslim, no. 2558]

Dengan dasar dalil-dalil yang telah disebutkan mengenai laba, maka dapat kita ketahui bahwa para Ulama' ahli fiqih mengharamkan setiap perniagaan yang dapat meresahkan atau merugikan orang lain, terlebih-lebih masyarakat umum, baik kerugian dalam urusan agama atau urusan dunia.

2.4 Kerangka Konseptual

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap *earnings* yang sering dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan *good corporate governance* di dalam perusahaan. Penerapan *good corporate governance* khususnya struktur kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba. Namun, di dalam penelitian ini akan digunakan proksi dengan menggunakan penerapan *corporate governance* yang di dasarkan atas struktur kepemilikan, dewan komisaris independen dan kualitas auditor. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme *corporate governance* dan kualitas auditor berpengaruh terhadap manajemen laba yang dapat meminimalisasi manajemen laba tersebut. Adapun penelitian yang mendukung faktor yang mempengaruhi mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut:

a) **Kepemilikan Manajerial**

Menurut Ningsaptiti (2010), Suryani (2010) dan Effendi (2013), yang menemukan bukti bahwa konsentrasi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, semakin besar kepemilikan saham maka semakin kecil praktik manajemen laba. Ini disebabkan karena kepemilikan saham yang terkonsentrasi dapat membuat pemegang saham pada posisi yang kuat

untuk mengendalikan manajemen secara efektif sehingga mampu membatasi perilaku oportunistik oleh manajer.

b) Kepemilikan Institusional

Adanya kepemilikan institusi dari pihak manajerial dianggap bisa mengurangi kecenderungan manajer dalam memanipulasi laba. Menurut Ningsaptiti (2010) dan Suryani (2010), yang menemukan bukti bahwa konsentrasi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Artinya, dengan adanya kepemilikan institusi memperkecil resiko terjadinya manipulasi laba di dalam perusahaan. Apa lagi jika di dukung dengan kepemilikan yang sama kuat antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

c) Dewan Komisaris independen

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dan pemegang saham, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Menurut Bayu Aji (2012) dan Effendi (2013), jika penempatan dewan komisaris independen masih ada campur tangan para pemegang saham mayoritas (pengendali/*founder*) artinya masih memegang peranan penting menyebabkan kinerja dewan tidak meningkat bahkan menurun.

d) Kualitas Auditor

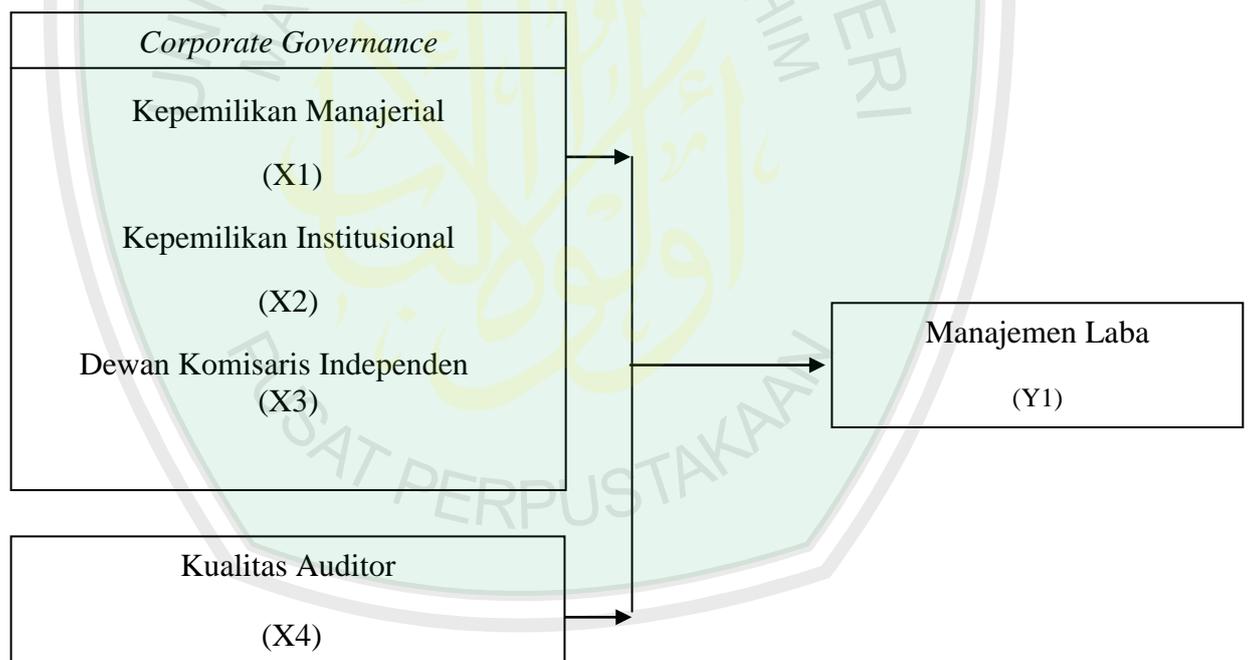
Menurut Ningsaptiti (2010), Panggabean (2011), Effendi (2013) dan Abdillah (2014) bahwa semakin ahli KAP terhadap industri tertentu maka semakin baik audit yang dilakukan sehingga manajemen laba dapat lebih cepat

terdeteksi. Hal ini disebabkan KAP yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama, akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus yang mewakili industri tersebut.

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka konseptual diatas di dapatkan kesimpulan konsep bahwasanya peneliti ingin menguji penerapan *corporate governance* dengan menggunakan proksi kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, dewan komisaris independen. Dan menggunakan variabel lain

dengan menggunakan kualitas auditor. Dengan melihat pengaruh keduanya terhadap manajemen laba. Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1 Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba

Praditia (2010) mengemukakan dari hasil penelitiannya bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi ketidaksiharasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham sehingga dapat menimbulkan terjadinya tindakan manajemen laba.

Sedangkan Suryani (2010) dan Effendi (2013) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Dari penelitian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.5.2 Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba

Ningsaptiti (2010) menyatakan dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan semakin kecil kemungkinan adanya praktek manajemen laba. Apa lagi jika di dukung dengan kepemilikan yang sama kuat antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hal ini disebabkan karena konsentrasi kepemilikan dapat membuat

pemegang saham pada posisi yang kuat untuk mengendalikan manajemen secara efektif sehingga mampu membatasi perilaku oportunitis.

Praditia (2010) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi tidak mampu mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba.

Suryani (2010) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Dari penelitian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

2.5.3 Dewan Komisaris Independen dengan Manajemen Laba

Bayu Aji (2012) mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*. Menurut Effendi (2013), dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (pengendali/*founder*) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan menurun. Akibatnya

fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif disebabkan karena adanya dewan komisaris independen tidak menjamin kebijakan manajemen laba yang diterapkan di perusahaan. Dari penelitian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3: Dewan Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

2.5.4 Kualitas Auditor dengan Manajemen Laba

Menurut Panggabean (2011), hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa komite audit independen dan kualitas auditor eksternal berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba, sedangkan proporsi dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hasil analisis juga menemukan variabel kontrol *leverage* mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap earning management sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Sedangkan menurut Abdillah (2014), yang dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 dari hasil penelitian analisis regresi data panel menunjukkan bahwa kualitas auditor, komite audit dan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian dari hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh signifikan, sedangkan komite audit dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H4: Kualitas Auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.